

Jelang Pilpres, BNPT Minta Pengurus Masjid Pemerintah Jaga Kondusifitas, Cegah Agitasi Politik

written by Harakatuna

Hakatuna.com. Jakarta. Masjid merupakan tempat yang sangat representatif bagi kalangan muslim untuk kegiatan, mulai dari kegiatan keummatan, keagamaan hingga kegiatan sosial. Selain kegiatan perayaan hari besar Islam, masjid juga sering menjadi tempat melakukan kajian, diskusi kebangsaan, ceramah keagamaan, serta kajian-kajian sosial lainnya.

Melihat peranan masjid yang sangat sentral di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim, dapat disimpulkan bahwa masjid memiliki pengaruh kuat dalam membentuk iklim sosial masyarakat di kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sayangnya dalam praktik sehari-hari ternyata banyak masjid yang dipakai untuk berbagai hal yang tidak tepat, misalnya kegiatan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, upaya agitasi untuk kepentingan elektoral, maupun distribusi materi keagamaan yang tidak ramah dan santun.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjend Pol. Ir. Hamli, M.E., pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Sabtu (02/03/2019) oleh Forum Silaturahmi Takmir Masjid Kementerian/Lembaga dan BUMN, menyampaikan tidak sedikit pelaku terorisme yang mendapatkan pemahaman menyimpang terkait agama setelah menghadiri ceramah di masjid tertentu yang disampaikan ustadz tertentu.

Menurut Hamli, pada acara FGD di Ballroom D' Hotel, Jl. Sultan Agung No. 9, Setia Budi, Jakarta Pusat, banyak gerakan radikalisme yang dibangun oleh mereka yang pernah ke luar negeri, terutama mereka yang pulang dari daerah konflik seperti Afganistan, Filipina, Suriah dan Iraq, lalu ketika pulang di Indonesia melakukan penyebaran dan doktrin-doktrin radikalisme. Hal itulah yang menjadi latar belakang terjadinya bom bunuh diri dan terorisme.`

“Orang-orang ini yang ketika pulang di Indonesia itulah yang berbahaya. Karena

mereka membawa sesuatu. Mereka membahwa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,” kata Hamli.

Oleh karena itu, Hamli mengajak kepada seluruh peserta FGD yang merupakan kumpulan dari seluruh takmir masjid di kementerian/lembaga dan BUMN, agar bisa menyatukan takmir masjid pemerintah untuk menyebarkan ajaran Islam yang damai, tenang, sejuk, dan rahmatan lil alamin.

Sementara itu, Akademisi UIN Jakarta, Moh. Najih Arramadlani, M.Ag., yang bertindak sebagai pemateri dalam FGD tersebut juga memaparkan bahwa masjid sudah seharusnya steril dari kepentingan-kepentingan radikal dan politik.

“Kenapa masjid menjadi sasaran, karena masjid sudah terlalu masuk ke dalam politik, politisasi masjid itulah yang membuat masjid kita menjadi tidak murni lagi. Kita melihat indikasinya sudah sangat matang. Mengkonsolidir 17.000 masjid di Jawa Timur untuk tanggal 17 April 2019 mendatang,” papar Najih.

Pemerhati Timur Tengah dan alumni Suriah ini juga mengatakan bahwa terdapat pola yang sama antara gerakan radikalisme di Suriah dan Indonesia itu sama. “Saya menemukan banyak pola yang sama antar radikalisme di Indonesia dengan Suriah di yaitu, menjadikan masjid sebagai basis gerakan radikalisme dan gerakan politik,” tutur Najih di sela-sela FGD.

Najih juga memberika alasan kenapa di Irak konfliknya tidak kunjung reda. “Kita lihat di Irak isu yang dibangun adalah isu sunni syiah. Di Suriah juga demikian, di Suriah itu sudah banyak masjid yang menjadi korban ledakan,” ujarnya.

“Qatar juga, kalau kita kenal Jumat dengan Jumat mubarak, tetapi di Qatar menjadikan hari Jumat sebagai Jumatul Ghadab (Revolusi Jumat),” lanjutnya.

Najih menambahkan FSTM diharapkan akan berperan aktif menjadi konsultan bagi masjid-masjid di kementerian, lembaga dan BUMN. “Misalnya menjelang Ramadhan, bila perlu FSTM menjadi konsultan bagi masjid-masjid yang lain. Syukur-syukur bisa mengeluarkan rekomendasi. Ustadz ini direkomendasikan, ustadz itu dikomendasikan begitu,” kata Najih.